

DINAMIKA LEMAHNYA KRITISME MASYARAKAT TERHADAP NEPOTISME DI INDONESIA

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Koresponden: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the weak public criticism of the practice of nepotism in Indonesia through the Elite Theory perspective developed by Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca. Nepotism, which is defined as giving important posts or positions to relatives or close friends without considering competence, has become an integral part of the Indonesian political system. This study uses descriptive qualitative research to explore the factors that influence people's attitudes towards nepotism and the interactions between these factors. Data sources were obtained through library research which included literature, articles and previous research. The research results show that the normalization of nepotism in Indonesia is strengthened by a paternalistic political culture, low community political participation, and economic dependence on political elites. The dominance of organized elites, as explained by Pareto and Mosca, plays a central role in weakening society's critical voice. Pareto emphasized that elites use nepotism to maintain power and hinder the circulation of new, more competent elites, while Mosca pointed out that elites manipulate public opinion and maintain the status quo through control over important resources and institutions. This condition results in apathy and the inability of society to form an effective opposition to the ruling elite. This research concludes that the weak public criticism of nepotism is a consequence of the dominance of elites who use their power to maintain control and avoid criticism. To overcome this problem, reforms are needed in the political and cultural system in Indonesia, including increasing transparency, strengthening anti-corruption institutions, as well as more inclusive and participatory political education. These findings provide a significant contribution to understanding the dynamics of power and social behavior in Indonesia and offer practical recommendations for strengthening the critical role of society in dealing with nepotism practices.

Keywords: Criticism; Nepotism; Elite Theory; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme di Indonesia melalui perspektif Teori Elite yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Nepotisme, yang

didefinisikan sebagai pemberian jabatan atau posisi penting kepada kerabat atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kompetensi, telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia. Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap nepotisme serta interaksi antara faktor-faktor tersebut. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, artikel, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi nepotisme di Indonesia diperkuat oleh budaya politik paternalistik, rendahnya partisipasi politik masyarakat, dan ketergantungan ekonomi terhadap elit politik. Dominasi elit yang terorganisir, sebagaimana dijelaskan oleh Pareto dan Mosca, memainkan peran sentral dalam melemahkan suara kritis masyarakat. Pareto menekankan bahwa elit menggunakan nepotisme untuk mempertahankan kekuasaan dan menghambat sirkulasi elit baru yang lebih kompeten, sementara Mosca menunjukkan bahwa elit memanipulasi opini publik dan menjaga status quo melalui kontrol atas sumber daya dan lembaga penting. Kondisi ini menghasilkan apatisme dan ketidakmampuan masyarakat untuk membentuk oposisi yang efektif terhadap elit yang berkuasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya kritisme masyarakat terhadap nepotisme merupakan konsekuensi dari dominasi elit yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan kontrol dan menghindari kritik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem politik dan budaya di Indonesia, termasuk peningkatan transparansi, penguatan lembaga anti-korupsi, serta pendidikan politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika kekuasaan dan perilaku sosial di Indonesia serta menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat peran kritis masyarakat dalam menghadapi praktik nepotisme.

Kata Kunci : Kritisme; Nepotisme; Teori Elite; Indonesia

Article history:

Received : 01/05/2024

Approved : 30/05/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

Pendahuluan

Nepotisme merupakan fenomena yang telah lama hadir dalam berbagai sistem sosial dan politik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.¹ Praktik ini

¹ Dzakwan Mu'aafi, *Jejak Nepotisme: Mengurai Benang Kusut Ketidakadilan-Jejak Pustaka* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), 1–75.

merujuk pada pemberian kesempatan atau posisi penting kepada keluarga atau teman dekat, seringkali tanpa mempertimbangkan kompetensi atau kelayakan individu tersebut.² Dalam konteks Indonesia, nepotisme telah menjadi salah satu isu yang mengakar kuat, bahkan seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya birokrasi dan politik.³

Seiring dengan berjalannya waktu, normalisasi nepotisme telah menjadi lebih sistematis dan meluas di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan,⁴ dunia usaha,⁵ hingga lembaga pendidikan.⁶ Keberadaan nepotisme yang semakin meluas menunjukkan adanya pola-pola tertentu dalam proses perekrutan dan penempatan individu dalam posisi strategis, yang mengabaikan prinsip meritokrasi. Dalam banyak kasus, praktik nepotisme ini tidak hanya merugikan individu-individu yang lebih layak, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang seharusnya berfungsi secara transparan dan adil.⁷

Lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme juga turut menjadi faktor yang memperkuat keberlangsungan praktik ini. Masyarakat yang kurang kritis cenderung menerima atau bahkan mengabaikan praktik nepotisme yang terjadi di sekitar mereka, tanpa menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Studi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang kritis terhadap nepotisme ketika praktik ini dianggap

² Trian Azhari Fadilah Sirait, Ali Imran Sinaga, dan Fadlin Fajri, “Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam,” *Instructional Development Journal* 7, no. 2 (t.t.): 281–86, <https://doi.org/10.24014/idj.v7i2.21033>.

³ Fiona Robertson-Snape, “Corruption, collusion and nepotism in Indonesia,” *Third World Quarterly* 20, no. 3 (1 Juni 1999): 589–602, <https://doi.org/10.1080/01436599913703>.

⁴ Fhisilmi Kaffah dkk., “Nepotisme dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 1 (2023): 2015–21, <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449>.

⁵ Sigit Hermawan, *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 1–65.

⁶ Early Sri Mulyani dan Ika Rifqiawati, “Marketplace Guru: Evaluasi Manfaat dan Tantangan dalam Transformasi Pendidikan,” vol. 1, 2023, 182–88, <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF/article/download/87/71>.

⁷ Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied, “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy,” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23–40, <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.

sebagai bagian dari budaya atau ketika kritik sosial tidak diartikulasikan secara efektif melalui media atau diskursus publik. Misalnya, penelitian yang menganalisis kritik sosial dalam lagu Dapur Keluarga oleh grup musik Feast mengungkapkan bahwa nepotisme sering kali dilihat sebagai bagian dari realitas sosial yang sulit dihindari, terutama dalam konteks korupsi dan kolusi di Indonesia.⁸ Penelitian lain mengaitkan lemahnya kritik masyarakat dengan bagaimana seni dan simbolisme digunakan untuk melegitimasi kekuasaan melalui nepotisme, seperti yang terlihat pada lukisan langit-langit Palazzo Barberini yang mempromosikan dinasti kepausan melalui ikonografi Barok.⁹ Dalam konteks organisasi, nepotisme juga ditemukan berdampak negatif pada kinerja dan kesejahteraan karyawan, khususnya ketika anggota keluarga yang kurang memenuhi syarat diberi posisi penting, sehingga menimbulkan konflik peran dan menurunkan kepercayaan diri.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan guna melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dikemukakan dan berusaha menjelaskan secara mendalam faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme, dengan menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain dan membentuk pola perilaku masyarakat yang cenderung menerima atau bahkan mendukung praktik nepotisme.

Selain itu, hasil temuan terkait faktor apa saja yang menjadi alasan lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme di analisis menggunakan teori elite yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Teori tersebut menjadi relevan untuk memahami dinamika kekuasaan yang memungkinkan praktik nepotisme terus berlangsung dengan minimnya perlawanan sosial. Teori elite, yang menekankan pada dominasi sekelompok kecil individu yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat,

⁸ Eri Hermawan, Taufik Nurohman, dan Wiwi Widiastuti, "Van Dijk's Critical Discourse Analysis of the 'Dapur Keluarga' Song and Its Relevance To The Corruption, Collusion, and Nepotism Phenomenon In Indonesia," *International Journal of Social Sciences Review* 3, no. 1 (2022): 73–94, <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i1.79>.

⁹ James Clifton, "Images of Nepotism: The Painted Ceilings of Palazzo Barberini. John Beldon Scott," *The Sixteenth Century Journal* 23, no. 4 (1 Desember 1992): 811–13, <https://doi.org/10.2307/2541743>.

¹⁰ Tom Calvard, "The bitter-sweet silver spoon: The effects of nepotistic hiring on employee performance and well-being," 2012, <https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/the-bitter-sweet-silver-spoon-the-effects-of-nepotistic-hiring-on>.

memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana elit-elit ini dapat memanipulasi struktur sosial dan politik demi kepentingan mereka sendiri. Selain itu, teori ini juga membantu memahami bagaimana elit-elit tersebut mampu mempertahankan kekuasaan mereka dengan melemahkan kritisme dan partisipasi politik masyarakat.¹¹

Dengan menggunakan kerangka teori elite, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana elit di Indonesia mampu menormalkan praktik nepotisme serta mengapa masyarakat cenderung lemah dalam mengkritisi praktik tersebut. Penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran kritis masyarakat dalam menghadapi praktik-praktik nepotisme. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori elite Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam studi kekuasaan dan perilaku sosial di Indonesia.

Secara metodologi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme di Indonesia. Penelitian ini bersifat eksploratif, mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap nepotisme, serta interaksi antara faktor-faktor tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan yang mencakup literatur, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik nepotisme dan kritik sosial. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori elite yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca sebagai kerangka analitis. Teori ini membantu peneliti menjelaskan bagaimana elit politik di Indonesia memanfaatkan nepotisme untuk mempertahankan kekuasaan mereka, serta mengapa masyarakat cenderung pasif dalam mengkritisi praktik tersebut. Melalui analisis ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kekuasaan dan peran masyarakat dalam konteks nepotisme di Indonesia.

¹¹ Pareto Vilfredo, *The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology* (New York: Bedminster Press, 1968); Norberto Bobbio, *Gaetano Mosca and the theory of the ruling class* (Librairie Droz, 1972).

Pembahasan

Upaya Normalisasi Nepotisme dan Faktor Lemahnya Kritisme Masyarakat

Lemahnya suara kritisme masyarakat terhadap maraknya perilaku nepotisme dalam pemerintahan di Indonesia mencerminkan sebuah fenomena sosial-politik yang kompleks. Nepotisme, yang sering diartikan sebagai pemberian jabatan atau posisi penting kepada kerabat dekat atau keluarga tanpa memperhatikan kualifikasi yang memadai, merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak luas.¹² Di Indonesia, kecenderungan ini tampak semakin menonjol dengan adanya kasus-kasus seperti terpilihnya anak presiden sebagai wakil presiden,¹³ dan upaya pengusungan anak bungsu sang presiden sebagai calon gubernur,¹⁴ meskipun dalam tanda kutip, mekanisme pemilihan dan pengusungan membawa-bawa nama “demokrasi”.¹⁵

Salah satu faktor utama yang menjelaskan lemahnya kritisme masyarakat adalah adanya normalisasi praktik nepotisme dalam konteks politik dan pemerintahan Indonesia.¹⁶ Sejak era Orde Baru, masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan sistem politik yang mengakar pada patronase dan jaringan kekeluargaan.¹⁷ Hal ini membuat praktik nepotisme sering kali

¹² Sugitanata, Aminah, dan Abdurrasyied, “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy.”

¹³ Agatha Vidya Nariswaris, “Mulusnya Jalan Anak Jokowi di Politik: Gibran Terpilih Jadi Wapres, Kini Kaesang Mau Maju Pilgub?,” *suara.com*, Jum’at Mei 2024, <https://www.suara.com/lifestyle/2024/05/31/100436/mulusnya-jalan-anak-jokowi-di-politik-gibran-terpilih-jadi-wapres-kini-kaesang-mau-maju-pilgub>.

¹⁴ Adhyasta Dirgantara, “Soal Kaesang Diusung Jadi Cawagub Ahmad Luthfi di Jateng, PSI: Terima Kasih, Nasdem,” *kompas.com*, Agustus 2024, Nasional edisi, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/20/13102881/soal-kaesang-diusung-jadi-cawagub-ahmad-luthfi-di-jateng-psi-terima-kasih>.

¹⁵ Syamsuddin Haris, “Nepotisme Ancam Demokratisasi,” *kompas.com*, Oktober 2008, <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/20/00370921/nepotisme.ancam.demokratisasi?page=all>.

¹⁶ Ferdian Andi, “Menyoal Nepotisme dalam Pemilihan Langsung,” *PUSKAPKUM*, 10 Februari 2023, <https://puskapkum.org/menyoal-nepotisme-dalam-pemilihan-langsung/>.

¹⁷ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

dianggap sebagai sesuatu yang wajar, meskipun sebetulnya bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan keadilan. Normalisasi ini diperparah oleh budaya politik yang cenderung paternalistik,¹⁸ di mana pemimpin dipandang sebagai figur yang harus dihormati dan dijaga, sehingga kritik terhadap mereka sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan atau bahkan subversif.

Selain itu, rendahnya partisipasi politik aktif di kalangan masyarakat juga menjadi penyebab melemahnya suara kritisme.¹⁹ Pendidikan politik yang minim serta rendahnya literasi politik mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak negatif nepotisme terhadap tata kelola pemerintahan.²⁰ Masyarakat lebih fokus pada isu-isu ekonomi sehari-hari daripada menyuarakan kritik terhadap kebijakan atau keputusan politik yang dinilai tidak adil.²¹ Di sisi lain, media massa, yang seharusnya berperan sebagai pengawas kekuasaan, sering kali terjebak dalam kepentingan politik tertentu, sehingga tidak mampu menyampaikan kritik yang tajam dan objektif terhadap praktik nepotisme.²²

Kondisi ini diperparah dengan adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum dan peradilan di Indonesia.²³ Masyarakat merasa bahwa mengkritik nepotisme tidak akan membawa perubahan yang nyata, mengingat sistem hukum sering kali tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-

¹⁸ Sapto Wahyono, “Budaya Paternalistik dalam Perumusan Kebijakan Publik,” *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2020): 231–48, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.1016>.

¹⁹ I Irma dan N Fajriyah, “Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum,” *Jurnal mahasiswa karakter bangsa* 1, no. 1 (2021): 110–13, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/13780>.

²⁰ Arif Sugitanata, “Literasi dan Pendidikan Politik dalam Pemilu 2024,” *ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id*, 12 Februari 2024, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/768/blog-post.html>.

²¹ Lawrence R Jacobs dan Robert Y Shapiro, “Polling politics, media, and election campaigns,” *Public Opinion Quarterly* 69, no. 5 (2005): 635–41, <https://doi.org/10.1093/poq/nfi068>.

²² Doron Shultziner dan Yelena Stukalin, “Distorting the News? The Mechanisms of Partisan Media Bias and Its Effects on News Production,” *Political Behavior* 43, no. 1 (1 Maret 2021): 201–22, <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09551-y>.

²³ Humas, “Keterpurukan Pemberlakuan Hukum di Indonesia,” *UMM*, Mei 2023, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/keterpurukan-pemberlakuan-hukum-di-indonesia.html>.

pelanggaran yang dilakukan oleh elit politik.²⁴ Ketidakpercayaan ini menciptakan apatisme yang menghambat terbentuknya gerakan kritis di kalangan masyarakat.²⁵

Lemahnya kritisme terhadap nepotisme di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap elit politik.²⁶ Dalam suatu kasus seperti jaringan patronase yang dibangun oleh para pemimpin politik hingga pemerintah mengandalkan distribusi sumber daya, seperti bantuan sosial, proyek infrastruktur, atau pekerjaan, yang secara langsung menguntungkan komunitas tertentu.²⁷ Ketergantungan ini menciptakan hubungan timbal balik di mana masyarakat enggan mengkritik, apalagi menentang praktik nepotisme karena takut kehilangan dukungan atau manfaat yang mereka peroleh dari elit tersebut. Hal ini dalam hemat peneliti mengakibatkan adanya semacam “persekongkolan diam-diam” yang semakin memperkuat posisi elit politik dalam menjalankan praktik nepotisme tanpa perlawanan.

Struktur politik yang terdesentralisasi pasca-reformasi, yang di satu sisi bertujuan untuk memperkuat demokrasi lokal, justru sering kali memberikan ruang lebih besar bagi praktik nepotisme di tingkat lokal. Kepala daerah, dengan kekuasaan yang semakin besar, sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk menempatkan anggota keluarga atau kerabat dekat dalam jabatan strategis, baik dalam pemerintahan maupun badan usaha milik daerah.²⁸ Kurangnya pengawasan dan mekanisme kontrol yang efektif di tingkat lokal membuat praktik-praktik semacam ini berjalan tanpa hambatan

²⁴ “Nepotism: The Never-Ending Battle,” *The Economist Educational Foundation*, Mei 2023, <https://talk.economistfoundation.org/festivals/festival-2023/equality-is-nepotism-acceptable/nepotism-the-never-ending-battle/>.

²⁵ Juan Felipe Riaño, “Family First, State Last: Bureaucratic Nepotism in a Modern State,” *World Bank Group*, 24 November 2021, <https://blogs.worldbank.org/en/impactevaluations/family-first-state-last-bureaucratic-nepotism-modern-state-guest-post-juan-felipe>.

²⁶ Asmiati Malik, “Nepotisme berdampak buruk bagi ekonomi, tapi banyak orang menganggapnya enteng,” *The Conversation*, Oktober 2018, <https://theconversation.com/nepotisme-berdampak-buruk-bagi-ekonomi-tapi-banyak-orang-menganggapnya-enteng-104575>.

²⁷ Pahrudin dan Hapsa, “Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya,” *JURNAL MAJELIS* 6, no. 1 (t.t.): 93–106, https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_Ed_6_2019.pdf#page=108.

²⁸ Khalib Gadafi dan Sasmi Nelwati, “Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia,” *Journal Innovation In Education* 2, no. 3 (2024): 133–48, <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>.

yang berarti, dan kritik terhadapnya pun sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari publik atau media.²⁹

Di sisi lain, budaya politik pragmatis yang berkembang di Indonesia juga berkontribusi terhadap lemahnya suara kritisme terhadap nepotisme.³⁰ Masyarakat yang memandang politik sebagai arena untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,³¹ sehingga nilai-nilai ideal seperti integritas, keadilan, dan meritokrasi menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, keberhasilan politik diukur dari seberapa besar seseorang atau kelompok dapat memperoleh sumber daya atau kekuasaan, bukan dari seberapa baik mereka dapat memperbaiki sistem atau melayani kepentingan publik. Akibatnya, nepotisme tidak hanya diterima, tetapi juga dianggap sebagai cara yang sah untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

Oleh karena itu, dalam memperkuat kritisme terhadap praktik nepotisme, perlu ada reformasi yang lebih mendalam dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Peningkatan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat publik, penguatan lembaga anti-korupsi, serta pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintah adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pembinaan budaya politik yang lebih berorientasi pada nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial juga sangat penting untuk mendorong masyarakat agar lebih kritis dan berani menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap praktik-praktik yang tidak etis seperti nepotisme.³² Tanpa perubahan signifikan dalam struktur politik dan budaya, kritisme terhadap nepotisme akan tetap lemah dan sulit untuk mempengaruhi perubahan yang berarti dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

²⁹ Ismansyah Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono, “Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya,” *Jurnal Demokrasi* 9, no. 1 (2010): 43–60, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1414>.

³⁰ Satryo Pringgo Sejati dan Ahmad Burhan Hakim, “Politik Transaksional dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern,” *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 69–75, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.819>.

³¹ Didik Gunawan Suharto dkk., “Pilkada, politik dinasti, dan korupsi,” 2017, 30–49, <https://repository.unimal.ac.id/3650/1/PROSIDING%20PERTEMUAN%20FORUM%20DEKAN%20ILMU%20ILMU%20SOSIAL%20PTN%20SE%20INDONESIA%202017.pdf#page=36>.

³² Sugitanata, Aminah, dan Abdurrasyied, “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy.”

Secara keseluruhan, lemahnya kritisme masyarakat terhadap nepotisme di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara normalisasi budaya politik yang tidak transparan, rendahnya literasi politik, ketergantungan ekonomi pada elit, serta pragmatisme politik yang mengabaikan nilai-nilai ideal seperti meritokrasi dan keadilan. Hal tersebut kemudian membutuhkan reformasi mendalam dalam struktur politik dan pembinaan budaya yang lebih demokratis dan transparan guna memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan akuntabel.

Dominasi Elit dan Lemahnya Kritisme: Analisis Nepotisme di Indonesia melalui Perspektif Teori Elite Pareto dan Mosca

Menganalisis fenomena lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme di Indonesia, penggunaan Teori Elite yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menjadi relevan karena teori ini menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan dalam setiap masyarakat cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang terorganisir dan mampu memanipulasi struktur sosial serta politik untuk mempertahankan dominasi mereka.³³ Mengingat bahwa nepotisme sering kali menjadi alat bagi elit untuk mempertahankan kekuasaan dan menghalangi munculnya oposisi yang efektif,³⁴ teori elit memberikan perspektif yang kritis dalam menelaah bagaimana praktik ini dapat berakar kuat dalam sistem politik Indonesia, serta bagaimana elit politik mempengaruhi dan mengontrol respon masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Menurut Vilfredo Pareto, dalam teori elitnya, masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok utama yakni elit dan non-elit. Elit, yang mencakup individu atau kelompok dengan kekuasaan dan pengaruh, cenderung mendominasi pengambilan keputusan politik dan sosial.³⁵ Dalam konteks Indonesia, elit politik menggunakan nepotisme sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat jaringan kekeluargaan mereka

³³ Vilfredo, *The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology*; Bobbio, *Gaetano Mosca and the theory of the ruling class*.

³⁴ Rimvydas Ragauskas dan Ieva Valeškaitė, "Nepotism, political competition and overemployment," *Political Research Exchange* 2, no. 1 (1 Januari 2020): 1–16, <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781542>.

³⁵ John Higley dan Jan Pakulski, "Pareto's theory of elite cycles: a reconsideration and application," dalam *Vilfredo Pareto* (Routledge: Routledge, 2017), 111–30.

dalam pemerintahan.³⁶ Pareto berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat, selalu ada sirkulasi elit, di mana elit lama digantikan oleh elit baru.³⁷ Namun, di Indonesia, sirkulasi ini sering kali tidak terjadi secara alami karena mekanisme nepotisme yang menghambat munculnya elit baru yang lebih kompeten. Fenomena ini menyebabkan stagnasi dalam sistem politik dan mengurangi efektivitas demokrasi, karena posisi kunci sering kali diisi oleh individu-individu yang kurang kompeten namun memiliki hubungan keluarga dengan elit yang berkuasa.

Gaetano Mosca, dalam teori elitnya, menekankan bahwa kekuasaan dalam masyarakat selalu dipegang oleh minoritas elit yang terorganisir, sementara mayoritas non-elit cenderung pasif dan tidak terorganisir. Mosca juga menyoroti bahwa elit memiliki kemampuan untuk memanipulasi opini publik dan mempertahankan status quo melalui kontrol terhadap sumber daya dan lembaga-lembaga penting, termasuk media dan sistem hukum.³⁸ Dalam kasus Indonesia, normalisasi nepotisme dapat dipahami sebagai hasil dari kontrol elit terhadap narasi politik dan sosial. Budaya paternalistik yang mengakar kuat, di mana pemimpin dihormati dan kritik dianggap tabu, merupakan manifestasi dari upaya elit untuk menjaga dominasi mereka.³⁹ Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap elit politik,⁴⁰ sebagaimana yang telah dikemukakan juga sejalan dengan pandangan Mosca tentang bagaimana elit menggunakan sumber daya untuk memastikan loyalitas dan menghambat munculnya perlawanan.

Fenomena lemahnya kritisme masyarakat dapat dilihat juga sebagai cerminan dari ketidakmampuan non-elit untuk bersatu dan membentuk oposisi yang efektif terhadap elit yang berkuasa. Pendidikan politik yang rendah dan apatisme yang meluas mencerminkan kurangnya kesadaran kritis di kalangan

³⁶ Sugitanata, Aminah, dan Abdurrasyied, “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy.”

³⁷ Alan Zuckerman, “The Concept” Political Elite”: Lessons from Mosca and Pareto,” *The Journal of Politics* 39, no. 2 (1977): 324–44, <https://doi.org/10.2307/2130054>.

³⁸ Bobbio, *Gaetano Mosca and the theory of the ruling class*.

³⁹ Wahyono, “Budaya Paternalistik dalam Perumusan Kebijakan Publik.”

⁴⁰ Asmiati Malik, “Nepotisme berdampak buruk bagi ekonomi, tapi banyak orang menganggapnya enteng.”

non-elit.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa elit berhasil dalam upaya mereka untuk menjaga masyarakat tetap pasif dan terpecah-pecah, sehingga meminimalkan ancaman terhadap kekuasaan mereka.

Pada akhirnya, dari perspektif teori elit Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, lemahnya kritisme masyarakat terhadap nepotisme di Indonesia adalah konsekuensi langsung dari dominasi elit yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mempertahankan kontrol dan mencegah munculnya oposisi. Nepotisme tidak hanya memperkuat kekuasaan elit, tetapi juga mengikis prinsip-prinsip meritokrasi dan keadilan dalam sistem politik, sehingga menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan berfungsi.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa lemahnya kritisme masyarakat terhadap praktik nepotisme di Indonesia adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Praktik nepotisme, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik Indonesia, semakin dinormalisasi melalui mekanisme yang mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi dan keadilan. Normalisasi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi politik aktif dan pendidikan politik masyarakat, yang menyebabkan apatisme terhadap praktik-praktik yang tidak etis seperti nepotisme.

Dalam konteks Teori Elite Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, lemahnya kritisme ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dominasi elit yang memegang kekuasaan di Indonesia. Pareto menekankan bahwa elit politik menggunakan nepotisme sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan menghambat sirkulasi elit yang seharusnya memungkinkan munculnya elit baru yang lebih kompeten. Sementara itu, Mosca menunjukkan bahwa elit memiliki kemampuan untuk memanipulasi opini publik dan mempertahankan status quo melalui kontrol terhadap sumber daya dan lembaga-lembaga penting, termasuk media dan sistem hukum. Hal ini menyebabkan masyarakat tetap pasif dan terpecah-pecah, sehingga tidak mampu membentuk oposisi yang efektif terhadap elit yang berkuasa.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa dominasi elit dalam struktur politik Indonesia memainkan peran penting dalam melemahkan kritisme masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan adanya

⁴¹ Arif Sugitanata, "Literasi dan Pendidikan Politik dalam Pemilu 2024"; Juan Felipe Riaño, "Family First, State Last: Bureaucratic Nepotism in a Modern State."

reformasi yang lebih mendalam dalam sistem politik dan budaya di Indonesia. Peningkatan transparansi dalam proses pengangkatan pejabat publik, penguatan lembaga anti-korupsi, serta pembinaan budaya politik yang lebih berorientasi pada nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial merupakan langkah penting yang perlu diambil. Selain itu, pendidikan politik yang lebih inklusif dan partisipatif dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga mereka lebih berani menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap praktik-praktik nepotisme dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adil dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Adhyasta Dirgantara. “Soal Kaesang Diusung Jadi Cawagub Ahmad Luthfi di Jateng, PSI: Terima Kasih, Nasdem.” *kompas.com*, Agustus 2024, Nasional edisi.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/20/13102881/soal-kaesang-diusung-jadi-cawagub-ahmad-luthfi-di-jateng-psi-terima-kasih>.
- Agatha Vidya Nariswaris. “Mulusnya Jalan Anak Jokowi di Politik: Gibran Terpilih Jadi Wapres, Kini Kaesang Mau Maju Pilgub?” *suara.com*, Jum’at Mei 2024.
<https://www.suara.com/lifestyle/2024/05/31/100436/mulusnya-jalan-anak-jokowi-di-politik-gibran-terpilih-jadi-wapres-kini-kaesang-mau-maju-pilgub>.
- Arif Sugitanata. “Literasi dan Pendidikan Politik dalam Pemilu 2024.” *ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id*, 12 Februari 2024.
<https://ilmusyariahdoctoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/768/blog-post.html>.
- Asmiati Malik. “Nepotisme berdampak buruk bagi ekonomi, tapi banyak orang menganggapnya enteng.” *The Conversation*, Oktober 2018.
<https://theconversation.com/nepotisme-berdampak-buruk-bagi-ekonomi-tapi-banyak-orang-menganggapnya-enteng-104575>.
- Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Bobbio, Norberto. *Gaetano Mosca and the theory of the ruling class*. Librairie Droz, 1972.
- Calvard, Tom. “The bitter-sweet silver spoon: The effects of nepotistic hiring on employee performance and well-being,” 2012.

- <https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/the-bitter-sweet-silver-spoon-the-effects-of-nepotistic-hiring-on>.
- Clifton, James. "Images of Nepotism: The Painted Ceilings of Palazzo Barberini. John Beldon Scott." *The Sixteenth Century Journal* 23, no. 4 (1 Desember 1992): 811–13. <https://doi.org/10.2307/2541743>.
- Ferdian Andi. "Menyoal Nepotisme dalam Pemilihan Langsung." *PUSKAPKUM*, 10 Februari 2023. <https://puskapkum.org/menyoal-nepotisme-dalam-pemilihan-langsung/>.
- Gadafi, Khalib, dan Sasmi Nelwati. "Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia." *Journal Innovation In Education* 2, no. 3 (2024): 133–48. <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>.
- Hermawan, Eri, Taufik Nurohman, dan Wiwi Widiastuti. "Van Dijk's Critical Discourse Analysis of the 'Dapur Keluarga' Song and Its Relevance To The Corruption, Collusion, and Nepotism Phenomenon In Indonesia." *International Journal of Social Sciences Review* 3, no. 1 (2022): 73–94. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i1.79>.
- Hermawan, Sigit. *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional*. Sidoarjo: Umsida Press, 2020.
- Higley, John, dan Jan Pakulski. "Pareto's theory of elite cycles: a reconsideration and application." Dalam *Vilfredo Pareto*, 111–30. Routledge: Routledge, 2017.
- Humas. "Keterpurukan Pemberlakuan Hukum di Indonesia." *UMM*, Mei 2023. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/keterpurukan-pemberlakuan-hukum-di-indonesia.html>.
- Irma, I, dan N Fajriyah. "Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum." *Jurnal mahasiswa karakter bangsa* 1, no. 1 (2021): 110–13. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/13780>.
- Ismansyah, Ismansyah, dan Purwantoro Agung Sulistyo. "Permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di daerah serta strategi penanggulangannya." *Jurnal Demokrasi* 9, no. 1 (2010): 43–60. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1414>.
- Jacobs, Lawrence R, dan Robert Y Shapiro. "Polling politics, media, and election campaigns." *Public Opinion Quarterly* 69, no. 5 (2005): 635–41. <https://doi.org/10.1093/poq/nfi068>.
- Juan Felipe Riaño. "Family First, State Last: Bureaucratic Nepotism in a Modern State." *World Bank Group*, 24 November 2021. <https://blogs.worldbank.org/en/impactevaluations/family-first-state-last-bureaucratic-nepotism-modern-state-guest-post-juan-felipe>.
- Kaffah, Fhisilmi, Irda Desbanita, Aini Hafizah, dan Adlin Adlin. "Nepotisme dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan

- Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 1 (2023): 103–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449>.
- Mu‘aafi, Dzakwan. *Jejak Nepotisme: Mengurai Benang Kusut Ketidakadilan- Jejak Pustaka*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Mulyani, Early Sri, dan Ika Rifqiawati. “Marketplace Guru: Evaluasi Manfaat dan Tantangan dalam Transformasi Pendidikan,” 1:182–88, 2023. <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNE/article/download/87/71>.
- Pahrudin dan Hapsa. “Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya.” *JURNAL MAJELIS* 6, no. 1 (t.t.): 93–106. https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_Ed_6_2019.pdf#page=108.
- Ragauskas, Rimvydas, dan Ieva Valeškaitė. “Nepotism, political competition and overemployment.” *Political Research Exchange* 2, no. 1 (1 Januari 2020): 1–16. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1781542>.
- Robertson-Snape, Fiona. “Corruption, collusion and nepotism in Indonesia.” *Third World Quarterly* 20, no. 3 (1 Juni 1999): 589–602. <https://doi.org/10.1080/01436599913703>.
- Sejati, Satryo Pringgo, dan Ahmad Burhan Hakim. “Politik Transaksional dan Pragmatisme Masyarakat Dalam Demokrasi Modern.” *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 69–75. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.819>.
- Shultziner, Doron, dan Yelena Stukalin. “Distorting the News? The Mechanisms of Partisan Media Bias and Its Effects on News Production.” *Political Behavior* 43, no. 1 (1 Maret 2021): 201–22. <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09551-y>.
- Sirait, Trian Azhari Fadilah, Ali Imran Sinaga, dan Fadlin Fajri. “Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam.” *Instructional Development Journal* 7, no. 2 (t.t.): 281–86. <https://doi.org/10.24014/idj.v7i2.21033>.
- Sugitanata, Arif, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied. “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy.” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23–40. <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.
- Suharto, Didik Gunawan, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Mantrini Indri Hapsari, dan Lungid Wicaksana. “Pilkada, politik dinasti, dan korupsi,” 30–49, 2017. <https://repository.unimal.ac.id/3650/1/PROSIDING%20PERTEMUA>

- N%20FORUM%20DEKAN%20ILMU%20ILMU%20SOSIAL%20PTN%20SE%20INDONESIA%202017.pdf#page=36.
- Syamsuddin Haris. "Nepotisme Ancam Demokratisasi." *kompas.com*, Oktober 2008.
<https://nasional.kompas.com/read/2008/10/20/00370921/nepotisme.ancam.demokratisasi?page=all>.
- The Economist Educational Foundation*. "Nepotism: The Never-Ending Battle." Mei 2023.
<https://talk.economistfoundation.org/festivals/festival-2023/equality-is-nepotism-acceptable/nepotism-the-never-ending-battle/>.
- Vilfredo, Pareto. *The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology*. New York: Bedminster Press, 1968.
- Wahyono, Sapto. "Budaya Paternalistik dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2020): 231–48.
<https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.1016>.
- Zuckerman, Alan. "The Concept "Political Elite": Lessons from Mosca and Pareto." *The Journal of Politics* 39, no. 2 (1977): 324–44.
<https://doi.org/10.2307/2130054>.